PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DI WEBSITE DENGAN OPINI AUDIT DAN LINGKUNGAN POLITIK SEBAGAI PEMODERASI (Studi Pada Pemerintah Provinsi, Kota Dan Kabupaten Di Sulawesi)

Yustina Hiola[1]
Rosidi[2]
Aji Dedi Mulawarman[2]
Universitas Brawijaya

Abstract

This study aims to determine the effect of the financial performance of local governments towards disclosure compliance of financial information on the website, as well as the moderation of the audit opinion and the political environment against the effects of the financial performance of local governments towards disclosure compliance of financial information on the website. The study was conducted at the local government in Sulawesi with 48 governments in the sample. The data collected were analyzed bye partial least square (PLS). The results showed that good financial performance of local governments can encourage disclosure compliance of financial information on the website. Audit opinion also encourage disclosure compliance of financial information on the website significantly, but moderation of audit opinion can weaken the disclosure of financial information on the website. This study also found that the political environment can not moderate the effects of the financial performance towards the disclosure compliance of financial information on the website. This is due to people who are more interested in paper-based reporting. Gorontalo district government is local government, which has the most excellent financial performance with complete disclosure of financial information and best audit opinion.

Keywords: audit opinion, disclosure compliance of financial information on the website, financial performance, political environment

[1] Mahasiswa FEB UB
[2] Dosen FEB UB

1. PENDAHULUAN

Pengembangan *website* pemerintah daerah diawali oleh instruksi presiden RI No. 3 tahun 2003. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk membangun situs *web* guna meningkatkan transparansi publik. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, juga mengatur mengenai kewajiban untuk setiap badan publik dalam mengumumkan informasi publik secara berkala. Publikasi hasil pengelolaan keuangan daerah secara khusus diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006, laporan keuangan daerah yang telah diaudit wajib dipublikasikan (pasal 302).

Pemilihan *website* sebagai media publikasi informasi keuangan daerah memiliki beberapa keunggulan. *Website* adalah sarana yang mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara efisien dan memengaruhi aspek komunikatif dari pelaporan keuangan. Kemampuan internet dalam memberikan kemudahan akses membuat data akuntansi secara elektronik akan dapat diakses kapanpun dan dimanapun (Xiao, *et al.*, 2005). Selain itu, internet juga memungkinkan komunikasi dua arah (Andriani, 2010). Pemanfaatan media internet ini dapat membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh pemda menjadi lebih efektif dan efisien.

Kemendagri mengeluarkan Instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dalam instruksi ini, kepala daerah diwajibkan menyiapkan menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” pada masing-masing *website* daerahnya. Konten transparansi ini memuat data terbaru mengenai RKA SKPD dan PPKD, ran-Perda APBD dan perubahannya, Perda APBD dan perubahannya, ringkasan DPA SKPD dan PPKD, LRA SKPD dan PPKD, serta LKPD yang telah diaudit oleh BPK disertai opini atas LKPD. Peraturan ini mulai berlaku bulan Mei 2012 dan paling lambat penerapannya pada tanggal 31 Juli 2012.

Peneliti telah melakukan *survey* awal terhadap *website* pemda di Sulawesi, *website* pemda yang menyediakan konten transparansi keuangan hanya 12 *website* dari total 79 pemda yang berada di pulau Sulawesi. Fakta ini menunjukkan pemda kurang terbuka kepada publik mengenai informasi keuangan (Survey awal dilakukan bulan Oktober 2013).

Dari fakta tersebut, peneliti menyimpulkan sementara bahwa sebagian besar pemda di Sulawesi belum memberikan perhatian lebih terhadap isu transparansi karena belum mengungkapkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di *website* meskipun regulasi yang mengatur telah mengharuskannya. Fenomena ini menarik untuk diteliti melihat terjadinya kesenjangan antara harapan masyarakat yang menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan fakta bahwa pemerintah belum sepenuhnya komitmen menjalankan amanat undang-undang No. 14 Tahun 2008 untuk mengelola dan menyediakan informasi yang berkualitas guna tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) aktivitas organisasi hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya dan untuk memperoleh dukungan legitimasi aktivitas organisasi serta pelaporannya harus sesuai dengan harapan masyarakat dan mencerminkan nilai sosial lingkungannya. Pemerintah daerah memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerjanya. Tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan programnya mendorong dilakukannya audit yang tidak hanya sebatas kepatuhan tetapi juga terhadap kinerja (Badjuri dan Trihapsari, 2004), sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dapat diartikan telah terlegitimasi. Tata kelola keuangan yang baik tercermin pada baiknya kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik apabilah telah terlegitimasi oleh opini audit yang wajar, dapat mendorong pemda kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*. Argumentasi ini didukung oleh penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) dimana

kinerja keuangan mempengaruhi pengungkapan, serta penelitian Hapsoro (2010); Martani dan Lestiani (2012).

Pengungkapan informasi keuangan di *website* juga dapat digunakan sebagai alternatif metode pelaporan untuk menunjukkan komitmen pemda yang akuntabel dan transparan. Baber dan Sen (1984) menyatakan bahwa kepala daerah terpilih dari suatu pemerintah daerah yang kompetisi politiknya tinggi, lebih rentan terhadap kritikan dari saingan politiknya. Dengan demikian, kepala daerah yang menjabat cenderung akan memilih metode pelaporan yang luas seperti pengungkapan di *website* sebagai langkah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Argumentasi ini didukung oleh penelitian Jorge, *et al.* (2011); Garcia dan Garcia (2010); serta Alvarez, *et al.* (2010) dimana kesimpulan dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa pemerintah yang memiliki kinerja yang baik akan sia-sia apabila persaingan politik dilingkungan pemerintahan tersebut terlalu tinggi. Lawan politik hanya akan memberitakan hal-hal negatif sehingga akan merugikan pemimpin daerah yang berkuasa. Namun hal ini dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas kepada masyarakat. Sehingga pemerintah yang memiliki kinerja yang baik namun berada pada lingkungan politik yang tidak menguntungkan akan melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website*.

Adanya hasil penelitian yang belum konsisten serta belum tegasnya sanksi pada pemda yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengungkapan informasi keuangan di *website*, menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai apakah **kinerja keuangan** pemerintah daerah dapat mempengaruhi kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*, serta dapatkah **opini audit** dan **lingkungan politik** memoderasi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*.

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan keterkaitan kinerja keuangan, kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website,* opini audit dan lingkungan politik dengan teori legitimasi. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mekanisme sebuah legitimasi sosial yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda. Dengan demikian, pemda dapat memperbaiki konten *website* agar dapat mengakomodir hak masyarakat atas transparansi pengelolaan keuangan daerah

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori legitimasi

Menurut O'donovan (2002) teori legitimasi didasarkan pada gagasan bahwa sebuah organisasi agar dapat terus beroperasi, organisasi tersebut harus bertindak dalam batas-batas perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Organisasi akan berusaha menciptakan keselarasan setiap kegiatannya dengan norma sosial masyarakat dimana organisasi berada. Selama program kerja dan kegiatan organisasi berjalan selaras, maka keberadaan dan aktivitas organisasi dapat disebut terlegitimasi.

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat dimana organisasi tersebut menggunakan sumber ekonomi. Jika terjadi perbedaan antara nilai organisasi dengan nilai sosial masyarakat, legitimasi perusahaan menjadi terancam. Perbedaan nilai ini sering disebut dengan *legitimacy gap* yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam melanjutkan kegiatannya. Clark (1956) dalam studinya memberikan contoh perubahan nilai yang terjadi sebagai konsekuensi dari adaptasi organisasi terhadap lingkungan. Dalam proses transformasi awal untuk menyesuaikan diri dengan

masalah, perubahan organisasi dapat membentuk nilai masyarakat yang lebih besar. Sumber kedua dari perubahan norma dan nilai-nilai sosial dapat berasal dari persaingan antara organisasi yang fokus terhadap nilai sosial dengan organisasi lainnya. Kelangsungan hidup organisasi ditingkatkan oleh legitimasi, legitimasi dapat dilihat sebagai sumber daya yang diberikan kepada organisasi sehingga terkadang organisasi bersaing untuk mendapatkannya. Legitimasi organisasi ditentukan oleh metode operasi, output dan tujuan aktivitas organisasi. Dowling dan Pfeffer (1975) menyebutkan bahwa legitimasi adalah kendala, tetapi merupakan kendala yang dinamis seperti organisasi yang beradaptasi, dan seperti nilai-nilai sosial yang menentukan perubahan legitimasi.

2.1.2. Kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda

Pengungkapan informasi keuangan di website biasa disebut dengan *Internet Financial Reporting* (IFR). IFR menurut Asbaugh, *et al.* (1999) adalah distribusi informasi keuangan perusahaan dan informasi kinerja menggunakan teknologi internet seperti *world wide web*. *Website* dapat digunakan secara leluasa oleh pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan yang dipandang perlu untuk investor, kreditor dan *stakeholder* lainnya, melakukan *update* data sewaktu-waktu, mengenalkan keunggulan daerahnya dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan, setiap *website* pemda menyediakan fitur "*online chatting*" yang dapat memungkinkan untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Penggunaan fitur ini dapat mengurangi biaya relasi dengan investor. Jadi, pengungkapan informasi keuangan dengan menggunakan media internet ini, selain dapat mempercepat penyampaian informasi dan *feedback* dari masyarakat, juga dapat meningkatkan kuantitas pengungkapan informasi keuangan. Kondisi ini akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi masalah asimetri informasi (Mardiati 2011).

Kepatuhan terhadap pengungkapan informasi keuangan telah banyak diteliti, namun yang diteliti lebih banyak mengenai kepatuhan pengungkapan berdasarkan standar akuntansi

pemerintahan (SAP). Penelitian ini menitik-beratkan pada kepatuhan pemerintah daerah pada pengungkapan informasi keuangan di *website*. Diketahui bahwa Mendagri telah mengeluarkan instruksi Mendagri RI No. 188-52/1797SJ yang mewajibkan setiap pemerintah daerah mengungkapkan konten transparansi pengelolaan anggaran daerah pada *website* masing-masing pemda.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan. Kinerja yang baik berarti pemerintah berhasil mengelola pemerintahan dengan baik pula. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan berusaha mengungkapkan dan menyebarkan berita baik tersebut kepada masyarakat secepat dan seluas mungkin. Penelitian-penelitian sebelumnya menghubungkan kinerja keuangan dengan pengungkapan informasi keuangan. Penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) meneliti hubungan kinerja keuangan pemerintah dengan tingkat pengungkapan di LKPD. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib pemerintah daerah dalam LKPD.

Penelitian Puspita dan Martani (2012) menganalisis pengaruh kinerja terhadap pengungkapan dan kualitas informasi di *website*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website*. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Laswad, *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah lokal berpengaruh pada *internet financial reporting*. Puspita dan Martani (2012) menjelaskan penyebab perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan karena penggunaan indeks pengungkapan yang lebih luas sehingga menyebabkan perbedaan hasil penelitian dari Laswad, *et al.* (2005).

Berdasarkan argumentasi teori yang dijelaskan diatas, kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh pada kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* (IFR).

H1 : Kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh pada kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* (IFR)

Opini audit adalah sebuah pernyataan profesional sebagai kesimpulan atas pemeriksaan mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan merupakan cara untuk mengawasi atau memonitor pemerintah daerah. Semakin baik opini audit yang diperoleh sebuah pemerintah daerah, maka mengindikasikan kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah tersebut juga semakin baik. Penelitian yang menghubungkan mengenai opini audit dengan kualitas pengungkapan dilakukan oleh Andriani (2012). Andriani (2012) menemukan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Penelitian Hapsoro (2010) menghubungkan kualitas audit dengan pengungkapan CSR dimana hasilnya membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang menghubungkan opini audit dengan pengungkapan wajib juga diteliti pada perusahaan publik di Cina oleh Gao dan Kling (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit dapat meningkatkan pengungkapan. Semakin baik opini yang diperoleh perusahaan publik maka semakin meningkat pula kepatuhan perusahaan tersebut pada pengungkapan wajib. Kedua penelitian tersebut cukup membuktikan bahwa opini audit yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan yang baik dapat mendorong sebuah organisasi untuk melakukan pengungkapan.

Opini audit yang baik didapatkan dari kinerja pemerintahan yang baik dan merupakan gambaran dari tertibnya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah. Maka dari itu, opini audit yang wajar dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website oleh pemerintah daerah. Sebaliknya,

opini audit yang buruk dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website*. Kinerja keuangan pemerintahan yang baik dilegitimasi oleh opini audit yang baik hingga dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* oleh pemda.

H_2 : Opini audit dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* (IFR)

Lingkungan politik sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah. Lingkungan politik yang kurang kondusif dimana pimpinan daerah didukung oleh minoritas partai di parlemen akan dapat mendorong untuk melakukan berbagai macam pengungkapan termasuk pengungkapan informasi keuangan di *website* guna mendapatkan legitimasi atas kinerja pemerintahannya. Garcia dan Garcia (2010) berpendapat bahwa lawan politik akan dengan cepat untuk menginformasikan penyimpangan apapun dalam tindakan partai penguasa yang tidak sesuai dengan janji-janji yang dibuat saat pemilu. Akibatnya, pemerintah akan lebih menjaga agar janji-janji pemilu tersebut dapat terealisasi agar dapat terus dipercaya oleh masyarakat dan dapat dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Menurutnya Garcia dan Garcia (2010) akan ada usaha yang lebih besar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh legitimasi masyarakat apabila tingkat kompetisi politik di daerah tersebut tinggi, sehingga diperlukannya strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pimpinan pemerintah daerah yang konsisten memenuhi janji-janji pemilu dan menjalankan manajemen pemerintahan yang baik akan sangat dirugikan dengan pemberitaan negatif dari lawan politiknya. Oleh karena itu, pimpinan pemerintah akan tertarik menggunakan semua sarana pelaporan yang tersedia untuk mengkomunikasikan kinerja pemerintahannya pada masyarakat (Baber dan Sen, 1984). Menurut Laswad, *et al*. (2005) pengungkapan kinerja keuangan dengan menggunakan *website* dinilai sebagai langkah yang paling efektif untuk melaporkan informasi. Oleh karena

itu semakin kompetitif lingkungan politiknya maka semakin banyak insentif yang akan dikeluarkan untuk mengkomunikasikan pada masyarakat (legitimasi) akan kinerja pemerintahan yang baik termasuk melalui pengungkapan informasi keuangan di *website* (Perez, *et al*., 2008). Dari pemaparan diatas penelitian ini menduga bahwa faktor lingkungan politik dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* apabila pimpinan daerah tersebut memiliki partai pendukung minoritas.

H_3 : Lingkungan politik dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* (IFR)

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah daerah yakni pemprov, pemkoa dan pemkab yang berada di Pulau Sulawesi. Total pemerintah daerah yang ada di pulau Sulawesi adalah 79 pemda. Teknik pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampeling* dengan kriteria memiliki *website* dan dapat diakses, LKPD 2013 tersedia, LKPD dalam format SAP, serta menyediakan data penelitian secara lengkap untuk seluruh variabel. Sampel akhir penelitian ini adalah 48 pemda (Tabel 1).

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website (IFR). Variabel ini diukur dengan menghitung daftar *scoring* indeks yang mengukur kepatuhan pemda dalam menyediakan informasi keuangan di *website* berdasarkan aturan instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ Tahun 2012 (Tabel 2). Variabel independen adalah kinerja keuangan (KK) dimana indikatornya adalah penyerapan belanja daerah (PBD), rasio efektivitas (RE) dan rasio kemandirian (RK). Variabel moderasinya adalah opini audit (OPINI) yang diukur dengan menggunakan skala ordinal dan lingkungan politik (POL) diukur dengan menggunakan skala nominal/*dummy*. Penelitian ini

dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS dinilai optimal untuk ketepatan memprediksikan suatu model dan tidak mensyaratkan asumsi distribusi data (Ghozali, 2008:5). Model jalur penelitian ini terlampir (gambar 1).

Pengujian yang dilakukan meliputi uji *inner model* yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian *outer model* koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Tingkat keyakinan yang dipilih adalah 90%. Tingkat keyakinan 90% dipilih karena penelitian mengenai pengungkapan informasi keuangan di *website* sangat rentan terhadap kesalahan yang tinggi. Penelitian Perez, *et al.* (2008), Laswad, *et al.* (2005) dan Garcia dan Garcia (2010) merupakan contoh penelitian mengenai pengungkapan informasi keuangan di *website* yang menggunakan tingkat signifikansi 10%

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan berbagai macam data yakni penelusuran *website* pemda (Y), laporan APBD dan realisasi APBD 2013 untuk menghitung kinerja keuangan pemda (X), ikhtisar hasil pemeriksaan BPK 2014 untuk mendapatkan opini audit (Z1), serta daftar nama gubernur, bupati dan walikota beserta partai pendukungnya (Z2). Dari data tersebut diperoleh variabel penelitian yakni IFR (Y), Kinerja keuangan (X) yang terdiri dari 3 indikator yakni penyerapan belanja daerah (PBD), rasio efektivitas (RE) dan rasio kemandirian (RK), Opini audit dan Lingkungan Politik (POL).

Rata-rata kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda selama periode pengamatan 2013 – 2014 adalah 0,22 (lihat tabel 3). Artinya rata-rata pemerintah daerah di Sulawesi melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* adalah sebesar 22% dari item-item pengungkapan yang disyaratkan oleh Kementrian Dalam Negeri pada Instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012. Standar deviasi lebih besar

daripada mean yakni sebesar 31,5% menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dalam sebaran data antara rasio IFR terendah dan tertinggi. Rata-rata rasio penyerapan belanja daerah 0,96 dengan standar deviasi 0,07. Rasio penyerapan belanja daerah mendekati angka 1 artinya anggaran belanja daerah terserap dengan cukup baik. Rata-rata rasio efektivitas adalah 1,23 dengan standar deviasi 0,305. Pemda dapat dikatakan efektif dalam pemungutan PAD ketika rasio efektivitas mencapai angka 1. Rata-rata rasio kemandirian yakni 0,11 dengan standar deviasi 0,17. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin rendah ketergantungan pemda pada dana transfer. Dari hasil penelitian ini terbaca bahwa rata-rata pemda di Sulawesi belum mandiri. Pemda yang memiliki rasio kemandirian yang tinggi yakni pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan rasio kemandirian sebesar 1,11.

Variabel opini audit memiliki rata-rata 3,25 dengan sebaran data 0,79. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pemda di Sulawesi mendapatkan opini WDP untuk LKPD 2013. Variabel lingkungan politik dengan rata-rata 0,90 dan standar deviasi 0,31. Dari hasil diatas dapat terlihat bahwa rata-rata kepala daerah pemda di Sulawesi didukung oleh minoritas partai.

4.2. Uji Validitas

Salah satu cara untuk melihat validitas data yakni dengan melihat tabel *cross loadings* (Tabel 4). Data valid apabila korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator tersebut dengan konstruk yang lain. Dari tabel *cross loading* (Tabel 4) diketahui bahwa indikator rasio kemandirian (RK) tidak valid.

Pengujian validitas kembali dilakukan pada data penelitian dengan mengeluarkan indikator RK dari konstruknya. Pengujian validitas dengan melihat tabel *Cross Loadings* (Tabel 5) menunjukkan variabel dalam penelitian ini validitasnya baik sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

4.3. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat hasil analisis *Composite Reliability*. Tingkat reliabilitas data dapat dikatakan baik apabila nilai *Composite Reliability* lebih dari sama dengan 0,7. Dari nilai *composite reliability* dapat disimpulkan bahwa reliabilitas data baik (Tabel 6).

4.4. Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis pengaruh variabel kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda dan dengan dimoderasi opini audit dan lingkungan politik dapat dilihat dari uji koefisien jalur (*path coefficients*). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 7. Koefisien determinasi sebesar 0,063 artinya kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemda di website (IFR) dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan, opini audit dan lingkungan politik sebesar 6,3%.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan mempengaruhi kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda. Opini audit dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda. Namun penelitian ini menemukan bahwa lingkungan politik tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda.

4.5. Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah disusun. Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah maka pemerintah daerah semakin patuh dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* resminya. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) serta Laswad, *et al.* (2005). Suhardjanto dan Lesmana (2010) mengungkapkan bahwa baiknya kinerja keuangan pemda tidak lepas dari

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Masyarakat yang taat membayar pajak cenderung akan lebih mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah akan melakukan pengungkapan seluasnya termasuk mengungkapkan informasi keuangan di *website* guna mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten Banggai, pemerintah kabupaten Soppeng, pemerintah kota Palopo, pemerintah kota Kendari, pemerintah provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten Bone Bolango, pemerintah kabupaten Gorontalo, dan pemerintah kabupaten Polewali Mandar adalah pemerintah daerah yang kinerja keuangannya baik melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* dengan tingkat pengungkapan di atas 50%. Temuan lain penelitian ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kota cenderung lebih banyak menyediakan informasi keuangan di *website* dari pada pemerintah kabupaten. Fakta ini mendukung penelitian Yu (2010) pada pemerintah Cina dimana pemerintah provinsi cenderung mengungkapkan lebih informasi keuangan di *website* dari pada pemerintah kota/kabupaten.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hipotesis bahwa opini audit dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*. Opini audit memiliki pengaruh positif yang signifikan secara langsung terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*. Dimana semakin baik opini audit yang diperoleh sebuah pemda maka pemda tersebut semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan. Temuan dari penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Andriani (2012) serta Hapsoro (2010). Andriani menyatakan bahwa opini audit yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan oleh pemerintah daerah.

Opini audit dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemda di *website*. Pemda yang memperoleh opini wajar

mengindikasikan kinerja keuangannya yang baik, berarti kegiatan pengelolaan pemerintahan oleh pemda tersebut sudah sejalan dengan harapan masyarakat (sejalan dengan nilai sosial). Menurut Parson (1961), sebuah organisasi dikatakan terlegitimasi apabila kegiatan organisasi sejalan dengan tujuan sistem sosialnya. Opini audit merupakan legitimasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah, mengartikan kegiatan pengelolaan pemerintahan yang sejalan dengan harapan lingkungan sosialnya sehingga hal tersebut dapat mendorong pemda melakukan pengungkapan di *website*. Namun, opini audit dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website. Hal ini disebabkan karena pemda di Sulawesi lebih banyak yang mendapatkan opini selain WTP dari pada pemda yang mendapatkan opini WTP, sehingga dorongan pemda untuk melakukan pengungkapan juga lemah. Pemda yang menjadi bukti temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa opini audit dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan pemda terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* adalah pemerintah kota Palu dengan tingkat pengungkapan IFR 36%, pemerintah kota Makassar dengan tingkat pengungkapan IFR 28%, serta pemerintah kota Baubau yang sama sekali tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website*nya. Pemerintah kabupaten seperti kabupaten Buol, kabupaten Parigi Moutong, kabupaten Sigi, kabupaten Toli-toli, kabupaten Bantaeng, kabupaten Enrekang, kabupaten Luwu Timur, kabupaten Sidenreng Rappang dan kabupaten Tana Toraja adalah kabupaten yang memperoleh opini WDP dan tidak sama sekali melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website*nya.

Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa lingkungan politik dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda. Pemda yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan lingkungan politiknya yang kompetitif, tidak serta merta memilih mengungkapkan informasi

kinerja keuangannya di *website*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Laswad, *et al.* (2005) dan Perez, *et al*. (2008). Laswad, *et al.* (2005) menemukan bahwa para manajer politik tidak melihat pengungkapan di *website* dapat digunakan sebagai sarana terbaik untuk praktek metode pelaporan. Menurut Perez, *et al.* (2008) angka persaingan politik tidak menekan entitas tersebut untuk mengungkapkan informasi keuangan di *website*. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Spanyol yang masih lebih tertarik dengan *paper-based reporting* dari pada pengungkapan informasi keuangan melalui *website.* Pengungkapan informasi keuangan dengan *paper-based reporting* memainkan peran kunci dalam pengungkapan informasi keuangan oleh pemda di *website*. Akibatnya, politisi-politisi daerah belum melihat pengungkapan informasi keuangan di *website* adalah cara utama untuk mendapatkan legitimasi masyarakat.

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), legitimasi adalah kendala, namun merupakan kendala yang dinamis seperti organisasi yang beradaptasi dengan nilai-nilai sosialnya. Hasil penelitian ini berada pada kasus ini. Pengungkapan informasi keuangan di *website* tidak dilihat sebagai jalan memperoleh legitimasi atas kinerja pengelolaan pemerintahan (meskipun lingkungan politik mendorong organisasi pemerintahan untuk melakukan hal tersebut) karena lingkungan sosial pemda lebih tertarik dengan *paper-based reporting*. Maka dari itu, pemerintah daerah beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan sosialnya.

Hasil penelitian ini dibuktikan dengan adanya pemda yang memiliki kinerja keuangan yang baik, tingkat kompetisi politiknya yang rendah, namun pengungkapan informasi keuangan di *website*nya cukup baik. Pemda tersebut adalah pemerintah kota Kendari dan pemerintah kabupaten Gorontalo. Pemkot Kendari memiliki angka keterserapan belanja 92% dan efektivitas pemungutan PAD sebesar 114%. Wali kota Kendari didukung oleh mayoritas partai, sehingga menurut hipotesis (dugaan sementara), pemkot Kendari tidak memiliki dorongan yang cukup untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan di

Website dikarenakan lingkungan politiknya yang tidak kompetitif (partai oposisi minoritas). Pada kenyataannya, pemkot Kendari melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website*nya sebesar 68%

48 sampel pemda yang diteliti, 5 diantaranya memiliki kompetisi politik yang rendah karena didukung oleh mayoritas partai-partai besar seperti kepala daerah kabupaten Buol, kepala daerah kabupaten Bantaeng, kepala daerah kabupaten Gowa, kepala daerah kota Kendari serta kepala daerah kabupaten Gorontalo. Dari kelima pemda tersebut, kepala daerah kabupaten Gowa yakni H. Ichsan Yasin Limpo, SH., MH. yang mendapatkan dukungan terbesar dari partai peserta pemilu paling besar diantara sampel lainnya yakni sebesar 68%. Pemerintah kabupaten Gowa memiliki angka keterserapan belanja daerah sebesar 100% dan efektivitas pemungutan PAD sebesar 137%, namun sama sekali tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website*. Sebanyak 43 sampel pemda di Sulawesi dengan persaingan politik yang cukup tinggi, 81% diantaranya kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*nya kurang dan bahkan ada pemda yang tidak sama sekali melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website*.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

5.1 Simpulan

Tingkat kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* (IFR) pemda di Sulawesi relatif masih rendah. Penyebaran pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda Sulawesi juga tidak merata. Beberapa pemda mengungkapkan seluruh konten publikasi yang disyaratkan Kemendagri, namun lebih banyak pemda yang pengungkapan informasi keuangan di website-nya kurang. Hal ini menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah daerah dalam penggunaan *website* sebagai media publikasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan

berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda, artinya kinerja keuangan yang baik dapat mendorong pemerintah daerah melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* resminya. Penelitian ini juga menemukan bahwa opini audit dapat mendorong kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*. Namun, opini audit dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda. Hal ini disebabkan persentase pemda yang mendapatkan opini WTP lebih sedikit sehingga dorongan pemda untuk melakukan pengungkapan lemah.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa lingkungan politik tidak berhasil memoderasi pengaruh kinerja keuangan pemda terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik namun memiliki lingkungan politik yang kompetitif, tidak serta merta memilih mengungkapkan prestasi pengelolaan keuangan daerahnya di *website*. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh publik yang masih lebih tertarik dengan *paper-based reporting* dari pada pengungkapan informasi keuangan melalui *website* sehingga politisi-politisi daerah belum melihat pengungkapan di *website* adalah cara utama untuk mendapatkan legitimasi masyarakat.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan keterkaitan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website*, kinerja keuangan pemda, opini audit dan lingkungan politik dengan teori legitimasi. Pada prakteknya, pemda di Sulawesi belum melihat penggunaan internet sebagai media publikasi informasi pengelolaan pemerintahan adalah pilihan yang tepat. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menemukan tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* yang masih sangat rendah dan tidak merata antara satu pemda dengan pemda lainnya. Pemda yang dapat dijadikan contoh oleh pemda lainnya dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* adalah pemerintah kabupaten

Gorontalo. Pemerintah kabupaten Gorontalo memiliki kinerja keuangan yang baik dan konsisten mendapatkan opini audit WTP dari BPK selama beberapa tahun. Pemerintah kabupaten Gorontalo juga melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website*nya secara lengkap dan tertata rapi seperti yang disyaratkan Kemendagri, meskipun kepala daerahnya didukung oleh mayoritas partai namun semangat untuk mewujudkan transparansi keuangan daerah tetap terjaga.

5.3 Keterbatasan dan Saran

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu tahun pengamatan. Peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti peningkatan kepatuhan pengungkapan dari waktu ke waktu.
2. Keterbatasan pengukuran kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan pengukuran kinerja keuangan lainnya.
3. Angka R^2 yang rendah mengindikasikan banyaknya variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda. Disarankan untuk mengeksplorasi variabel perilaku masyarakat dan akses internet rumah tangga, agar dapat mengukur umpan balik masyarakat akan tersedianya informasi keuangan di *website* pemda.

6. DAFTAR REFERENSI

Alvarez, I.G., L.R. Dominguez dan I.M.G. Sanchez. 2010. Are determining factors of municipal e-government common to a worldwide municipal view? An intra-country comparison. *Government Information Quarterly 27*. www.sciencedirect.com. Diakses 3 oktober 2013

Andriani, Evanti. 2012. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Andriani, Sri. 2010. Internet sebagai media pelaporan informasi keuangan pada perusahaan LQ-45 di BEI. *El-Muhasaba Vol. 1 No. 2*. http://ejournal.uin-malang.ac.id. Diakses 8 November 2013

Asbaugh, Hollis, K.M. Johnstone and T.D. Warfield. 1999. Corporate Reporting on Internet. *Accounting Horizon Vol. 13 No. 3*.

Baber, W.R. dan P. K. Sen. 1984. The Role of Generally Accepted Reporting Methods in the Public Sector: An Empirical Test. *Journal of Accounting and Public Policy*. Pp 91-106

Badjuri, Achmad dan W. Trihapsari. 2004. Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah. *Fokus Ekonomi*. Agustus 2004

Christiaens, Johan. 1999. Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities : An Empirical Investigation. *Financial Accounting dan Management 15 (1)*. February 1999. P 21-40

Clark, B.R. 1956. Organizational Adaptation and Precarious Value : a Case Study. *American Sociological Review 21*. 327-336

Daftar Nama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Seluruh Indonesia. http://otda.kemendagri.go.id/. Diakses 18 November 2014

Dowling, John dan J. Pfeffer. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review Vol. 18 No. 1* hal. 122-136

Gao, Lei dan Gerhard Kling. 2012. The impact of corporate governance and external audit on compliance to mandatory disclosure requirements in China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 21*. Hal. 17– 31

Garcia, A. G. dan J. G. Garcia. 2010. Determinants of online reporting of accounting information by spanish local government authorities. *Local Government Studies Vol. 36 No. 5*. Hal. 679-695

Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation ModelingMetode Alternatif dengan Pertial Least Square (PLS)*. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang

Hapsoro, Dody. 2010. Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 23 No. 3, Desember 2012*. Hal 199-215

Instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Jorge, Susana, P.M. Sa, A.F. Pattaro dan R.P. Lourenco. 2011. Local government financial transparency in Portugal and Italy : a comparative exploratory study on its

determinants. *13th Biennial CIGAR Conference, Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting*.

Krina, L.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Jakarta

Laswad, Fawzi, R. Fisher dan P. Oylere. 2005. Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy 24*. www.sciencedirect.com. Diakses 2 Oktober 2013

Mardiati, Endang. 2011. Determinan penyebaran informasi keuangan melalui website pada perusahaan publik di Indonesia. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya

Martani, Dwi dan Annisa Lestiani. 2012. Disclosure in local government financial statements : the case of Indonesia. *Gloval review of Accounting and Finance Vol. 3 No. 1. March 2012*. P 67-84.

O'Donovan, Gary. 2002. Environmental Disclosures in the Annual Report Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal Vol. 15 No. 3*. Pp. 344-371

Parsons, Talcott. 1961. Structure and Process in Modern Societies, Review by: Frances Gillespie Scott. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 5, No. 4. pp. 614-617

Perez, C.C., M.P.R. Bolivar dan A.M.L. Hernandez. 2008. E-Government process and incentives for online public financial information. *Online Information Review Vol. 32 No. 2*. www.emeraldinsight.com. Diakses 17 September 2013

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Puspita, Rora dan Dwi Martani. 2012. Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. *Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*. 20-23 September 2012

Suhardjanto, Djoko dan S.I. Lesmana. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Prestasi Vol. 6 No. 2.* Hal 25-40

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Xiao, J.Z., M.J. Jones and A. Lymer. 2005. A Conceptual Framework for Investigating the Impact of the Internet on Corporate Financial Reporting. *The International Journal of Digital Accounting Research Vol 5. N 10*. Pp 131-169.

Yu, He. 2010. On the determinants of internet-based disclosure of government financial information. *Management and Service Science*. International conference on 24-26 Agustus 2010

7. LAMPIRAN

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Tahapan Eliminasi Sampel	Jumlah
Jumlah Pemda di Sulawesi	79
Website tidak dapat diakses, *maintenance, dll*	(8)
LKPD 2013 belum terbit	(9)
LKPD format Permendagri	(9)
LKPD yang belum selesai diperiksa BPK	(5)
Sampel	**48**

Tabel 2
***Scoring index* berdasarkan instruksi Mendagri RI**

Tools Presentasi	Skala
Konten Transparansi	0/1
Ringkasan RKA SKPD	0/1/2
Ringkasan RKA PPKD	0/1/2
Ran-Perda APBD	0/1/2
Ran-Perda perubahan APBD	0/1/2
Perda APBD	0/1/2
Perda Perubahan APBD	0/1/2
Ringkasan DPA SKPD	0/1/2
Ringkasan DPA PPKD	0/1/2
LRA SKPD	0/1/2
LRA PPKD	0/1/2
LKPD Auditted	0/1/2
Opini	0/1/2
Total	25

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Standar Deviasi
IFR (Y)	0.22	0.315
PBD (X)	0.96	0.073
RE (X)	1.23	0.305
RK (X)	0.11	0.173
OPINI (Z1)	3.25	0.786
POL (Z2)	0.90	0.309

Tabel 4
Cross Loadings dengan RK

	IFR(Y)	KINERJA_KEU(X)	OPINI(Z1)	POL(Z2)	X*Z1	X*Z2
PBD*OPINI	0.114	0.257	0.945	-0.168	0.954	-0.086
PBD*POL	-0.099	0.158	-0.176	0.972	-0.160	0.945
RE*OPINI	0.040	0.330	0.689	-0.243	0.832	-0.002
RE*POL	-0.091	0.239	-0.132	0.800	-0.021	0.937
RK*OPINI	0.037	-0.145	0.246	0.036	0.283	-0.263
RK*POL	0.034	-0.123	0.128	0.201	0.170	-0.109
X (PBD)	0.142	0.905	-0.091	-0.046	0.106	0.294
X (RK)	0.061	-0.116	0.163	0.051	0.209	-0.248
X(RE)	0.015	0.505	-0.007	-0.188	0.236	0.179
Y (IFR)	1.000	0.188	0.073	-0.131	0.105	-0.105
Z1 (OPINI)	0.073	-0.024	1.000	-0.154	0.947	-0.184
Z2 (POL)	-0.131	-0.048	-0.154	1.000	-0.181	0.889

Tabel 5
Cross Loadings tanpa RK

	IFR(Y)	KINERJA_KEU(X)	OPINI(Z1)	POL(Z2)	X*Z1	X*Z2
PBD*OPINI	0.114	0.236	0.945	-0.168	0.984	-0.099
PBD*POL	-0.099	0.168	-0.176	0.972	-0.142	0.961
RE*OPINI	0.040	0.292	0.689	-0.243	0.855	-0.012
RE*POL	-0.091	0.227	-0.132	0.800	-0.006	0.954
X (PBD)	0.142	0.996	-0.091	-0.046	0.247	0.200
X(RE)	0.015	0.500	-0.007	-0.188	0.284	0.147
Y (IFR)	1.000	0.137	0.073	-0.131	0.100	-0.099
Z1 (OPINI)	0.073	-0.088	1.000	-0.154	0.924	-0.161
Z2 (POL)	-0.131	-0.062	-0.154	1.000	-0.197	0.929

Tabel 6
Composite Reliability

	Composite Reliability
IFR(Y)	1.000
KINERJA_KEU(X)	0.747
OPINI(Z1)	1.000
POL(Z2)	1.000
X*Z1	0.918
X*Z2	0.957

Tabel 7
Hasil Analisis Koefisien Jalur

	Nilai Koefisien	P Values	Keterangan
KINERJA_KEU(X) -> IFR(Y)	0.498	0.076	Signifikan
OPINI(Z1) -> IFR(Y)	1.370	0.031	Signifikan
POL(Z2) -> IFR(Y)	-0.559	0.268	Tidak signifikan
X*Z1 -> IFR(Y)	-1.374	0.038	Signifikan
X*Z2 -> IFR(Y)	0.428	0.324	Tidak signifikan
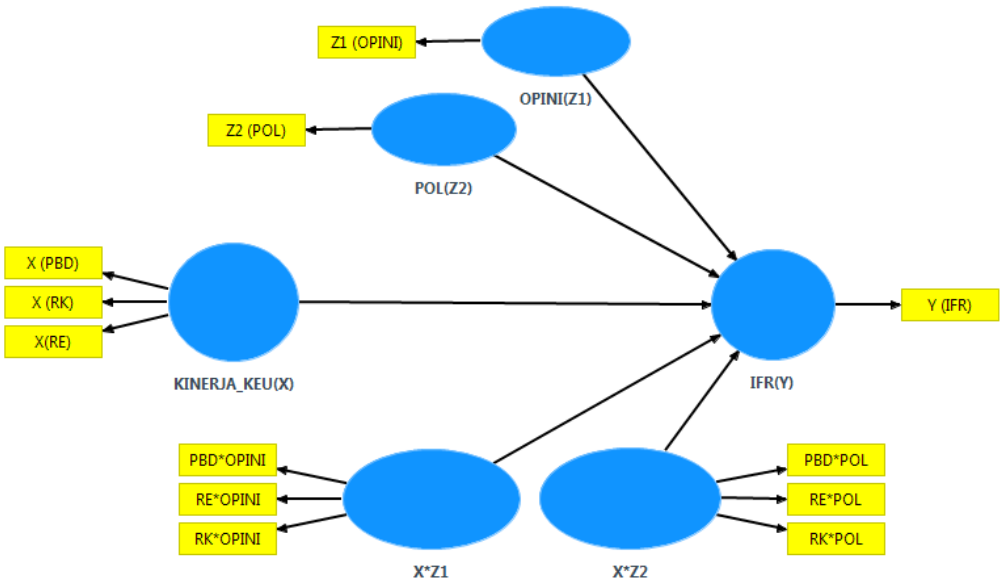
Gambar 1
Model Jalur Penelitian